

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kinerja keuangan pada umumnya merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat diukur melalui laporan keuangan, dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. Ukuran kinerja perusahaan yang baik diawali dengan adanya kepercayaan dari investor terhadap suatu perusahaan bahwa dana yang mereka investasikan dalam keadaan aman dan diharapkan dapat menghasilkan *return* yang baik pula. Untuk mencapai integritas kinerja keuangan, perusahaan perlu menetapkan tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih sering dikenal dengan "*Good Corporate Governance*".

*Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik menjelaskan hubungan antara berbagai unsur dalam perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* dengan baik, tentunya dapat mengembangkan usahanya dengan baik pula. Istilah *corporate governance* muncul karena adanya *agency theory*, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Pemisahan ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan

pengurus perusahaan. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Akibatnya, wewenang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* dimana manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Manajer dengan informasi yang dimilikinya bisa bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (*asymmetry information*). Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut (Forum *Corporate Governance in Indonesia*), dalam Andri (2015).

Perhatian terhadap *corporate governance* di Indonesia awalnya dipicu oleh skandal spektakuler seperti Bank Bali Indonesia pada tahun 1997 dimana manajer bank mengalihkan dana investasi yang ada untuk mendanai partai politik tertentu, kasus PT Freeport Indonesia pada tahun 2017 dimana terdapat ketidaksesuaian laporan dengan fakta di lapangan yang ditemukan oleh pihak BPK. Ada juga kasus skandal keuangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar yang sempat menjadi perhatian dunia seperti Enron, *Tyco*, *Worldcom*, *Global Crossing* yang melibatkan akuntan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Skandal yang menyerang perusahaan-perusahaan tersebut memberikan efek yang luar biasa bagi perekonomian negaranya hingga berdampak pada krisis yang terjadi hampir di

seluruh negara di dunia. Kondisi yang sama dialami pula oleh *General Motors*, *CIT Group*, *MF Global Holdings Ltd*, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang semula tidak diduga akan mengalami kegagalan finansial memunculkan sentimen negatif terhadap pasar sehingga menyebabkan krisis keuangan di berbagai belahan dunia (Reddy et al, 2010; Ujunwa, 2012; Ross dan Crossan, 2012) dalam Ika et al (2013).

Lemahnya *corporate governance* salah satunya ditandai dengan tidak efektifnya peran dari manajer sebagai pengelola perusahaan (Mallin, 2007). Ketidakefektifan ini muncul ketika manajer sebagai pengelola perusahaan tidak menjalankan fungsinya sebaik mungkin sehingga tidak dapat memenuhi tujuan yang diinginkan oleh para pemegang saham yang mempekerjakannya. Hal inilah yang kemudian memunculkan konflik kepentingan di dalam perusahaan. Konflik kepentingan tersebut dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme yang dapat mengakomodir baik kepentingan para pemegang saham selaku pemilik maupun kepentingan manajer selaku pengelola. Untuk menciptakan *corporate governance* yang baik, mekanisme tersebut dibagi menjadi dua yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal (Ujunwa, 2012 dalam Ika et al, 2013).

Menurut Puspitasari dan Ernawati (2010), mekanisme internal melibatkan pemilik dan pengelola perusahaan seperti komposisi Dewan Komisaris, kepemilikan manajerial dan konsentrasi kepemilikan. Sedangkan mekanisme eksternal melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan seperti penggunaan utang dari para pemberi pinjaman yang tertuang dalam *leverage* perusahaan. Kedua mekanisme ini dapat memicu manajemen, yang mungkin

memiliki kecenderungan untuk mengejar keuntungan pribadi, mengambil keputusan sesuai dengan aturan dan berorientasi pada tujuan perusahaan guna memaksimalkan nilai dari para pemegang saham.

Riset *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (2002), menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan *corporate governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan GCG akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai perusahaan. *Corporate Governance* juga dapat menjadi jalan dalam upaya mengeliminasi upaya rekayasa manajemen. Dengan adanya pembuatan peraturan tentang keharusan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi tertentu secara wajib (*mandated disclosure*) dan sukarela (*voluntary disclosure*), maka diharapkan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan dapat lebih baik dan transparan.

Di Indonesia konsep *good corporate governance* mulai diperkenalkan sejak tahun 1999. Momentum pengenalan GCG dimulai setelah pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) oleh pemerintah. KNKG dibentuk pada tahun 2004, dan mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia pada tahun 2006. Pedoman tersebut memuat peraturan yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan harus membuat pernyataan yang menyangkut kesesuaian penerapan GCG dengan pedoman yang telah dikeluarkan

oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Artinya, setiap perusahaan harus sudah mampu menerapkan prinsip yang terdapat dalam GCG.

Penerapan *corporate governance* dianggap penting untuk dijadikan acuan dalam mengelola struktur perusahaan, mengarahkan dan mengelola bisnis serta berbagai urusan perusahaan lainnya guna meningkatkan kemakmuran perusahaan. Kemakmuran dari suatu perusahaan dapat diukur ataupun dihitung dengan menggunakan *Return of Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Net Profit Margin*. ROA, ROE, dan NPV merupakan contoh dari rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA. ROA merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. ROA dapat menunjukkan efisiensi dari aset yang digunakan dalam menghasilkan laba. Maka dari itu, peneliti menggunakan *Return of Asset (ROA)* sebagai alat ukur kinerja perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang keseluruhan atau sebagian sahamnya dikuasi oleh pemerintah. BUMN diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian Indonesia dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Maka untuk mencapai itu, BUMN terus berbenah menjadi badan usaha yang jauh lebih baik dari sebelumnya, termasuk pembenahan dalam penerapan konsep *corporate governance*. Sejak tahun 2002, melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) No.Kep-117/M-MBU/2002 tentang kewajiban

penerapan konsep *Good Corporate Governance* pada BUMN yang kemudian Keputusan Meneg. BUMN tersebut diperbaharui pada tahun 2011 No.PER-01/MBU/2011 dengan tujuan melakukan penyempurnaan penerapan *corporate governance* pada BUMN. Dengan adanya keharusan bagi BUMN dalam penerapan konsep *corporate governance*, maka diharapkan BUMN dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Selain itu, kesadaran akan pentingnya penerapan *corporate governance* di Indonesia dikarenakan keinginan untuk menegakkan integritas perusahaan, meningkatkan kinerja, serta menjalankan bisnis yang sehat agar BUMN dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai hubungan pengungkapan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERIODE 2015 – 2018)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pentingnya suatu rumusan masalah adalah untuk mengarahkan pembahasan agar lebih terarah dan sesuai dengan tujuannya. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas adalah :

1. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah remunerasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
5. Apakah ukuran dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan remunerasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka batasan masalah yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai BUMN. Perusahaan-perusahaan yang digunakan hanya perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2015 – 2018.
2. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan *Return on Asset (ROA)*.
3. *Corporate governance* diproksikan dengan ukuran dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan remunerasi.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah remunerasi dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan.
5. Untuk mengetahui apakah ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan remunerasi secara simultan dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi ilmu pengetahuan dan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan strategis *corporate governance* agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan.



3. Bagi pemangku kepentingan, hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kinerja perusahaan menjadi salah satu faktor dalam mengambil keputusan investasi.
4. Bagi pihak eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para investor, kreditor, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.
5. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat mengetahui tolak ukur keberhasilan perusahaan dan mempertimbangkan penentuan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika atau kerangka penulisan ini dibagi menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut :

**BAB I**           Pendahuluan merupakan bagian yang membahas atau menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**           Landasan teori dan pengembangan hipotesis merupakan bagian yang membahas landasan teori mengenai teori-teori apa saja yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang akan diteliti, dan pengembangan hipotesis yang disimpulkan dari landasan teori dari penelitian terdahulu.

- BAB III** Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan penelitian dilakukan secara operasional. Pada bagian ini definisi dan operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang merupakan deskripsi tentang jenis atau model analisis dan mekanisme analisis yang digunakan dalam penelitian.
- BAB IV** Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.
- BAB V** Penutup merupakan bagian paling akhir yang menjelaskan tentang kesimpulan berisi penyajian secara singkat, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.